**BAB V**

**PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk*,* ukuranpemerintah daerah*,* dan dana perimbangan terhadap kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan masih banyaknya penduduk yang tidak patuh pajak, penghasilan yang diperoleh masyarakat juga cenderung kecil sehingga tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak. Sehingga berdampak pada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah yang belum bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam mengawasi penganggaran.
2. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini mengindikasi bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan telah dapat mengelola dengan baik aset yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pelayanan ke masyarakat telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah terus meningkat.
3. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah dengan arah koefisien negatif, artinya dana perimbangan berperan dalam meningkatkan kemandirian kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, namun masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih belum mampu menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan maksimal. Oleh karena itu, semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yaitu dari dana perimbangan, maka semakin rendah kemandirian kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut.
4. Seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk ukuranpemerintah daerah*,* dan dana perimbangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan dalam penelitian ini variabel kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, ukuranpemerintah daerah*,* dandana perimbangan sebesar 0,675 (67,5%) dan sisanya 32,5% dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel *wealth, leverage,* belanja daerah, ukuran legislatif dan lainnya.

**5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka pemerintah daerah diharapkan agar dapat terus meningkatkan kemandirian kinerja keuangannya hingga semaksimal mungkin agar mampu menghasilkan kemandirian kinerja yang lebih optimal dan dapat menyelenggarak pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi sumatera Selatan juga harus dapat mengoptimalkan PAD yang menjadi sumber pendapatan utama daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan (dana transfer) dari pemerintah pusat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah unit observasi yang digunakan dan meninjau kembali kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih, karena pada penelitian ini kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, variabel independennya hanya mempengaruhi sebesar 67,5% dan sisanya 32,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti variabel *wealth, leverage,* belanja daerah, ukuran legislatif dan lainnya, serta memperbarui periode pengamatan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan proksi lain selain rasio kemandirian dalam mengukur kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah yang diantaranya adalah rasio efesiensi, efektivitas dan aktivitas.
5. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah unit observasi yang digunakan, dan mengambil sampel selain